

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah (PD) menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bapenda Kabupaten Langkat disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Langkat, Renstra Bapenda Kabupaten Langkat, serta Renja Bapenda Provinsi Sumatera Utara.

Proses penyusunan Renja Bapenda Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja pada Renstra Bapenda 2019-2024 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun ke-2 (kedua) perencanaan pembangunan Kabupaten Langkat yang berpedoman pada RKPD 2022. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024 yaitu "Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, Dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan". Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 (Lembaran Daerah Langkat Tahun 2020 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor);

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat adalah untuk memberikan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang berkaitan dengan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Langkat secara sinergis dan berkesinambungan.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan Rencana Kerja strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah,
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan,
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

1.4 Sistematika

Penulisan Rencana Kerja Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bapenda melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan pada Urusan Pemerintahan. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2020 melaksanakan 7 program, dan 27 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**SASARAN, PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN
BAPENDA KAB. LANGKAT TAHUN 2020**

SASARAN	Program/Kegiatan Tahun 2020	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Secara Tepat Waktu	1 Tahun
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air	12 Bulan
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja	Tercapainya Peningkatan Kinerja	1 Tahun
	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya Peningkatan Kerja	1 Tahun
	Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	Tersedianya Blanko dan keperluan kantor	1 Tahun
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi penerangan listrik yang baik	1 Tahun
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu kantor	1 Tahun

	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun
	Penyediaan jasa administrasi umum	Terlaksananya administrasi umum dan keuangan serta tersedianya jasa pegawai honorer	12 Bulan
	II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun
	III. Program peningkatan disiplin aparatur	Pertumbuhan Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai	100 %
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Melayu Bapenda	222 Stel
	IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	100 %
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	1 Tahun
Meningkatnya penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	100 %
		Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	100 %
		Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	100 %
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Tahun

	VI. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Piutang Pajak dan Retribusi yang terselesaikan	100 %
		Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak	100 %
		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi	100 %
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terdatanya Potensi PAD dan Tersusunnya Buku Potensi PAD	1 Paket
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 Bulan
	Rapat evaluasi dan koordinasi penerimaan daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan
	Penagihan Pajak Daerah yang tertunggak dan pajak berjalan kecamatan	terlaksananya penagihan pajak daerah yang tertunggak	1 Paket
	Mengerjakan ketetapan pajak/retribusi daerah	terlaksananya penerbitan dan pendistribusian ketetapan pajak/retribusi daerah	12 Bulan
	Penyampaian SPPT PBB-P2 dan Penjabaran target setiap kecamatan, kelurahan / desa Pemberian penghargaan / hadiah bagi yang berprestasi merealisasikan pendapatan daerah	terlaksananya Penyampaian SPPT	1 Paket
		termotivasinya petugas pemungut / pengelola penerimaan daerah	1 Paket
	Monitoring, evaluasi serta pengawasan dalam pemungutan pajak / retribusi daerah	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan	12 Bulan
	Verifikasi Piutang Pajak	terlaksananya verifikasi piutang pajak daerah	12 Bulan
	VII. Program peningkatan pengelolaan dan pengembangan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase pencapaian PBB-P2	100 %
		Persentase pencapaian BPHTB	100 %
	Cetak Masal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2	terlaksananya cetak masal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2	1 Paket

	Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 Pola SISMIOP	Terlaksananya pemeliharaan basis data PBB-P2 Pola SISMIOP	12 Bulan
	Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2	Terlaksananya Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2	1 Paket
	Verifikasi, Pendataan dan Pemuktahiran Dta OP dan WP PBB-P2	Terlaksananya Verifikasi, Pendataan dan Pemuktahiran Dta OP dan PBB-P2	12 Bulan

Pengukuran kinerja Bapenda didasarkan Rencana Kerja pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Bapenda Kabupaten Langkat tahun 2020 telah tercapai. Dari 27 indikator kinerja dengan 2 sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

SASARAN	Program / Kegiatan	INDIKATOR SASARAN (Program) / Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	L. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Secara Tepat Waktu	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air	12 Bulan	12 Bulan	100
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja	Tercapainya Peningkatan Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya Peningkatan Kerja	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	Tersedianya Blanko dan keperluan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Terciptanya Instalasi penerangan listrik yang baik	1 Tahun	1 Tahun	100

	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan jasa administrasi umum	Terlaksananya administrasi umum dan keuangan serta tersedianya jasa pegawai honorer	12 Bulan	12 Bulan	100
	II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	100 %
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	100
	III. Program peningkatan disiplin aparatur	Pertumbuhan Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai			100%
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Training Bapenda	222 Stel	222 Stel	100
	IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai			100 %
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	1 Tahun	1 Tahun	100

SASARAN	Program / Kegiatan	INDIKATOR SASARAN (Program) / Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	100 %	100 %	
		Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	100 %	100 %	
		Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	100 %	100 %	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
	VI. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Piutang Pajak dan Retribusi yang terselesaikan	100 %	100 %	
		Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak	100 %	100 %	
		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi	100 %	100 %	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terdatanya Potensi PAD dan Tersusunnya Buku Potensi PAD	1 Paket	1 Paket	100
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 Bulan	12 Bulan	100
	Rapat evaluasi dan koordinasi penerimaan daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	100
	Penagihan Pajak Daerah yang tertunggak dan pajak berjalan kecamatan	terlaksananya penagihan pajak daerah yang tertunggak	1 Paket	1 Paket	100
	Mengerjakan ketetapan pajak/retribusi daerah	terlaksananya penerbitan dan pendistribusian ketetapan pajak/retribusi daerah	12 Bulan	12 Bulan	100

	Penyampaian SPPT PBB-P2 dan Penjabaran target setiap kecamatan, kelurahan / desa	terlaksananya Penyampaian SPPT	1 Paket	1 Paket	100
	Pemberian penghargaan / hadiah bagi yang berprestasi merealisasikan pendapatan daerah	termotivasinya petugas pemungut / pengelola penerimaan daerah	1 Paket	1 Paket	100
	Monitoring, evaluasi serta pengawasan dalam pemungutan pajak / retribusi daerah	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	100
	Verifikasi Piutang Pajak	terlaksananya verifikasi piutang pajak daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
	VII Program peningkatan pengelolaan dan pengembangan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase pencapaian PBB-P2	100 %	100 %	
		Persentase pencapaian BPHTB	100 %	100 %	
	Cetak Masal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2	terlaksananya cetak masal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2	1 Paket	1 Paket	100
	Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 Pola SISMIOP	Terlaksananya pemeliharaan basis data PBB-P2 Pola SISMIOP	12 Bulan	12 Bulan	100
	Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2	Terlaksananya Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2	1 Paket	1 Paket	100
	Verifikasi, Pendataan dan Pemuktahiran Dta OP dan WP PBB-P2	Terlaksananya Verifikasi, Pendataan dan Pemuktahiran Dta OP dan PBB-P2	12 Bulan	12 Bulan	100

REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 Bapenda Kabupaten Langkat alokasi belanja dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

- Jumlah Anggaran Kegiatan (Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung) Tahun 2020
- Rp. 21.121.005.719,00
- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp. 18.636.951.690,00
- Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung tahun 2020 Rp. 14.777.797.719,00
- Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung tahun 2020 Rp. 12.827.272.093,00
- Jumlah Anggaran Belanja Langsung tahun 2020 Rp. 6.343.208.000,00
- Realisasi Anggaran Belanja Langsung tahun 2020 Rp. 5.809.679.597,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Bapenda Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bapenda Kabupaten Langkat Sampai dengan 31 Desember 2020

NO	BELANJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI S/D 31 DES 2020
	BELANJA				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.777.797.719,00	12.827.272.093,00	1.950.525.626,00	86,80
	Belanja Pegawai	14.777.797.719,00	12.827.272.093,00	1.950.525.626,00	86,80
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.699.245.000,00	5.192.881.391,00	506.363.609,00	90,11
	Tunjangan Keluarga	568.920.000,00	515.373.662,00	53.546.338,00	90,58
	Tunjangan Jabatan	151.000.000,00	125.245.000,00	25.755.000,00	82,94
	Tunjangan Fungsional Umum	271.000.000,00	250.435.000,00	20.565.000,00	92,41
	Tunjangan Beras	328.000.000,00	275.051.160,00	52.948.840,00	83,85
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.500.000,00	2.287.716,00	2.212.284,00	50,83
	Pembulatan Gaji	200.000,00	65.880,00	134.120,00	32,94
	Iuran Asuransi Kesehatan	382.120.000,00	336.960.102,00	45.159.898,00	88,18
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	15.000.000,00	10.706.461,00	4.293.539,00	71,37

Jaminan Kematian (JKM)	40.500.000,00	32.119.156,00	8.380.844,00	79,30
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.768.000.000,00	3.249.035.165,00	481.095.348,00	86,22
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.549.312.719,00	2.837.111.400,00	712.201.319,00	79,93
BELANJA LANGSUNG	6.343.208.000,00	5.809.679.597,00	533.528.403,00	91,58
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.847.718.000,00	2.654.668.699,00	193.049.301,00	93,22
Penyediaan jasa surat menyurat	70.000.000,00	63.175.000,00	6.825.000,00	90,25
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	398.000.000,00	265.363.646,00	132.636.354,00	66,67
Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja	61.850.000,00	17.820.750,00	44.029.250,00	28,81
Penyediaan alat tulis kantor	145.442.350,00	144.484.200,00	958.150,00	99,34
Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	201.191.500,00	199.712.400,00	1.479.100,00	99,26
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor	9.612.500,00	9.612.500,00	-	100
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	9.940.650,00	7.390.650,00	2.550.000,00	74,34
Penyediaan makanan dan minuman	37.830.000,00	33.900.000,00	3.930.000,00	89,61
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	480.000.000,00	479.358.553,00	641.447,00	99,86
Penyediaan jasa administrasi umum	1.433.851.000,00	1.433.851.000,00	-	100
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	360.000.000,00	294.867.064,00	65.132.936,00	81,90

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	360.000.000,00	294.867.064,00	65.132.936,00	81,90
Program peningkatan disiplin aparatur	188.700.000,00	178.290.000,00	10.410.000,00	94,48
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	188.700.000,00	178.290.000,00	10.410.000,00	94,48
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	84.000.000,00	31.890.701,00	52.109.299,00	37,96
Pendidikan dan pelatihan formal	84.000.000,00	31.890.701,00	52.109.299,00	37,96
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	157.470.000,00	152.885.000,00	4.585.000,00	97,08
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	157.470.000,00	152.885.000,00	4.585.000,00	97,08
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.391.420.000,00	1.278.317.633,00	113.102.367,00	91,87
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	126.420.000,00	110.127.633,00	16.292.367,00	87,11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100
Rapat evaluasi dan koordinasi penerimaan daerah	32.900.000,00	26.194.000,00	6.706.000,00	79,61

Penagihan Pajak Daerah yang tertunggak dan pajak berjalan kecamatan	319.250.000,00	300.400.000,00	18.850.000,00	94,09
Mengerjakan ketetapan pajak/retribusi daerah	41.120.000,00	9.640.000,00	31.480.000,00	23,44
Penyampaian SPPT PBB-P2 dan Penjabaran target setiap kecamatan, kelurahan / desa	323.980.000,00	285.706.000,00	38.274.000,00	88,18
Pemberian penghargaan / hadiah bagi yang berprestasi merealisasikan pendapatan daerah	160.050.000,00	158.750.000,00	1.300.000,00	99,18
Monitoring, evaluasi serta pengawasan dalam pemungutan pajak / retribusi daerah	151.200.000,00	151.000.000,00	200.000,00	99,86
Verifikasi Piutang Pajak	128.500.000,00	128.500.000,00	-	100
Program peningkatan pengelolaan dan pengembangan PBB-P2 dan BPHITB	1.313.700.000,00	1.218.760.500,00	94.939.500,00	92,77
Cetak Masal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2	503.060.000,00	460.881.500,00	42.178.500,00	91,61
Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 Pola SISMIOP	269.500.000,00	263.297.000,00	6.203.000,00	97,69
Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2	277.060.000,00	231.652.000,00	45.408.000,00	83,61
Verifikasi, Pendataan dan Pemuktahiran Dta OP dan WP PBB-P2	264.080.000,00	262.930.000,00	1.150.000,00	99,56

Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Realisasi s/d 31 Des 2020	Target Renja	Realisasi Renja	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.847.718.000,00	2.654.668.699,00	93,22	1 Tahun	1 Tahun	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Secara Tepat Waktu	70.000.000,00	63.175.000,00	90,25	1 Tahun	1 Tahun	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air	398.000.000,00	265.363.646,00	66,67	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja	Tercapainya Peningkatan Kinerja	61.850.000,00	17.820.750,00	28,81	1 Tahun	1 Tahun	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya Peningkatan Kerja	145.442.350,00	144.484.200,00	99,34	1 Tahun	1 Tahun	100
5	Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	Tersedianya Blanko dan keperluan kantor	201.191.500,00	199.712.400,00	99,26	1 Tahun	1 Tahun	100
6	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Terciptanya Instalasi penerangan listrik yang baik	9.612.500,00	9.612.500,00	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.940.650,00	7.390.650,00	74,34	1 Tahun	1 Tahun	100

8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu kantor	37.830.000,00	33.900.000,00	89,61	1 Tahun	1 Tahun	100
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	480.000.000,00	479.358.553,00	99,86	1 Tahun	1 Tahun	100
10	Penyediaan jasa administrasi umum	Terlaksananya administrasi umum dan keuangan serta tersedianya jasa pegawai honorer	1.433.851.000,00	1.433.851.000,00	100	12 Bulan	12 Bulan	100
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	360.000.000,00	294.867.064,00	81,90	1 Tahun	1 Tahun	100
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	360.000.000,00	294.867.064,00	81,90	1 Tahun	1 Tahun	100

III	Program peningkatan disiplin aparatur	Pertumbuhan Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai	188.700.000,00	178.290.000,00	94,48	222 Stel	222 Stel	100
I	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Training Bapenda	188.700.000,00	178.290.000,00	94,48	222 Stel	222 Stel	100
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	84.000.000,00	31.890.701,00	37,96	1 Tahun	1 Tahun	100
I	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	84.000.000,00	31.890.701,00	37,96	1 Tahun	1 Tahun	100
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	157.470.000,00	152.885.000,00	97,08	100%	100%	100
		Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu						
		Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu						

1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah	157.470.000,00	152.885.000,00	97,08	1 Tahun	1 Tahun	100
VI	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Piutang Pajak dan Retribusi yang terselesaikan	1.391.420.000,00	1.278.317.633,00	91,87	100 %	100 %	100
		Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak						
		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi						
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terdatanya Potensi PAD dan Tersusunnya Buku Potensi PAD	126.420.000,00	110.127.633,00	87,11	1 Paket	1 Paket	100
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	108.000.000,00	108.000.000,00	100	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Rapat evaluasi dan koordinasi penerimaan daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	32.900.000,00	26.194.000,00	79,61	12 Bulan	12 Bulan	100
4	Penagihan Pajak Daerah yang tertunggak dan pajak berjalan kecamatan	terlaksananya penagihan pajak daerah yang tertunggak	319.250.000,00	300.400.000,00	94,09	1 Paket	1 Paket	100
5	Mengerjakan ketetapan pajak/retribusi daerah	terlaksananya penerbitan dan pendistribusian ketetapan pajak/retribusi daerah	41.120.000,00	9.640.000,00	23,44	12 Bulan	12 Bulan	100

6	Penyampaian SPPT PBB-P2 dan Penjajaran target setiap kecamatan, kelurahan / desa	terlaksananya Penyampaian SPPT	323.980.000,00	285.706.000,00	88,18	1 Paket	1 Paket	100
7	Pemberian penghargaan / hadiah bagi yang berprestasi merealisasikan pendapatan daerah	termotivasinya petugas pemungut / pengelola penerimaan daerah	160.050.000,00	158.750.000,00	99,18	1 Paket	1 Paket	100
8	Monitoring, evaluasi serta pengawasan dalam pemungutan pajak / retribusi daerah	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan	151.200.000,00	151.000.000,00	99,86	12 Bulan	12 Bulan	100
9	Verifikasi Piutang Pajak	terlaksananya verifikasi piutang pajak daerah	128.500.000,00	128.500.000,00	100	12 Bulan	12 Bulan	100
VII	Program peningkatan pengelolaan dan pengembangan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase pencapaian PBB-P2	1.313.700.000,00	1.218.760.500,00	92,77	100 %	100 %	100
		Persentase pencapaian BPHTB						
1	Cetak Masal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2	terlaksananya cetak masal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2	503.060.000,00	460.881.500,00	91,61	1 Paket	1 Paket	100
2	Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 Pola SismiOP	Terlaksananya pemeliharaan basis data PBB-P2 Pola SismiOP	269.500.000,00	263.297.000,00	97,69	12 Bulan	12 Bulan	100

3	Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2	Terlaksananya Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2	277.060.000,00	231.652.000,00	83,61	1 Paket	1 Paket	100
4	Verifikasi, Pendataan dan Pemuktahiran Dta OP dan WP PBB-P2	Terlaksananya Verifikasi, Pendataan dan Pemuktahiran Dta OP dan PBB-P2	264.080.000,00	262.930.000,00	99,56	12 Bulan	12 Bulan	100
		JUMLAH	6.343.208.000,00	5.809.679.597,00	91,58			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan 7 program dan 27 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2020, realisasi keuangan adalah ditargetkan sebesar Rp. **2.847.718.000,00** terealisasi sebesar Rp. **2.654.668.699,00** atau sama dengan **93,22%**
2. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2020, realisasi keuangan adalah ditargetkan sebesar Rp. **360.000.000,00** terealisasi sebesar Rp. **294.867.064,00** atau sama dengan **81,90 %**.
3. Pertumbuhan Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai
Program peningkatan disiplin aparatur tahun 2020, realisasi keuangan adalah ditargetkan sebesar Rp. **188.700.000,00** terealisasi sebesar Rp. **178.290.000,00** atau sama dengan **94,48 %**.
4. Cakupan peningkatan kompetensi pegawai
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tahun 2020, realisasi keuangan adalah ditargetkan sebesar Rp. **84.000.000,00** terealisasi sebesar Rp. **31.890.701,00** atau sama dengan **37,96 %**
5. Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu, Persentase laporan aset/barang daerah, Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tahun 2020, realisasi keuangan adalah ditargetkan sebesar Rp. **157.470.000,00** terealisasi sebesar Rp. **152.885.000,00** atau sama dengan **97,08 %**
6. Persentase Piutang Pajak dan Retribusi yang terselesaikan, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah tahun 2020, realisasi keuangan adalah ditargetkan sebesar Rp. **1.391.420.000,00** terealisasi sebesar Rp. **1.278.317.633,00** atau sama dengan **91,87 %**.
7. Persentase pencapaian PBB-P2, Persentase pencapaian BPHTB
Program peningkatan pengelolaan dan pengembangan PBB-P2 dan BPHTB tahun 2020, realisasi keuangan adalah ditargetkan sebesar Rp. **1.313.700.000,00** terealisasi sebesar Rp. **1.218.760.500,00** atau sama dengan **92,77 %**.

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra BAPENDA periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja Pelayanan BAPENDA. Kinerja pelayanan BAPENDA disajikan pada tabel berikut:

Pencapaian Kinerja BAPENDA Tahun 2016- 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	TARGET NSPK	TARGET IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Target peningkatan PAD dari tahun sebelumnya			-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase peningkatan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB			-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu			-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Kabupaten Langkat terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya, namun peningkatan tersebut belum optimal, masih banyak beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Kabupaten Langkat dalam peningkatan optimalisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kualitas dan kapasitas SDM Badan Pendapatan;
2. Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional untuk melaksanakan kegiatan terutama pada pengelolaan pendapatan;
3. Masih adanya ketergantungan sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan yang berasal dari pusat;
4. Tuntutan target penerimaan pendapatan asli daerah yang selalu meningkat;
5. Potensi PAD belum dikelola secara maksimal;
6. Nilai objek pajak PBB yang belum sesuai dilapangan;
7. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
8. Instansi pengelola income selain Badan Pendapatan masih ada yang belum mencapai target penerimaan pendapatannya yang mempengaruhi capaian penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan;
9. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan;
10. Tuntutan kurangnya transparansi / publikasi APBD kepada masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja perangkat Daerah

Rancangan awal RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel berikut

Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
5	02				Keuangan						
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota						
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Gaji dan Tunjangan ASN - Jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan - Terpenuhinya Insentif Pajak Daerah - Terpenuhinya Kewajiban Normatif PNS	Bapenda	14 Bulan 17 bulan 12 bulan 12 bulan	15,000,000,000	APBD	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	1205 OR	900,200,000	APBD	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi PAD Bulanan dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Bapenda	1 Dokumen	10,000,000	APBD	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda	1332 OR	211,440,000	APBD	

8	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS Bapenda	Bapenda	217 Setel	150,000,000	APBD	
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapenda	702 OH	104,000,000	APBD	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	10-Orang	100,000,000	APBD	
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Penerangan Listrik yang Baik	Bapenda	1 tahun	10,000,000	APBD	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya Peningkatan Kerja Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	1 Tahun	135,000,000	APBD	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman tamu Kantor	Bapenda	12 Bulan	51,650,000	APBD	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bapenda	1 tahun	150,000,000	APBD	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Antar Daerah	Bapenda	1 Tahun	400,000,000	APBD	
8	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	1 Unit	400,000,000	APBD	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Bapenda	1 Paket	100,000,000	APBD	
5	02	01	2.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	1 Paket	150,000,000	APBD	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	1 Paket	100,000,000	APBD	
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	1 Paket	100,000,000	APBD	

5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertindakannya Pemabayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air	Bapenda	12 Bulan	500,000,000	APBD
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya Peningkatan Kerja	Bapenda	1 Tahun	70,000,000	APBD
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terkirimnya Surat Secara Tepat Waktu	Bapenda	1 Tahun	300,000,000	APBD
					Tersedianya Honorer Cleaning Service, Penjaga Malam dan Sisir	130 OB				
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tertindakannya Pemeliharaan Rutin/Berkas Kendaraan Dinas Operasional	Bapenda	1 Tahun	500,000,000	APBD
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	1 Tahun	15,000,000	APBD
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tertindakannya Penjilidan	Bapenda	5000 Lembar	195,870,000	APBD
				Tersedianya Buku Potensi Pajak Daerah		50 Set				
				Bertambahnya Jumlah Objek Pajak / Wajib Pajak		480 OH				
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tertindakannya Cetak Masal SPPU, STTS dan EHKP PBB-P2	Bapenda	1 Paket	275,236,000	APBD
				Tertindakannya Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 Pola SISMIOP		180 OH				
				Tertindakannya Aplikasi Maintenance Aplikasi SISMIOP PBB-P2		1 Paket				
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Besi Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHH)	Tersedianya Pena Zona Nilai Tanah	Bapenda	1 Paket	875,930,000	APBD
				Tersedianya Objek Pajak / Wajib Pajak PBB-P2 Khusus Perumahan		400 OH				
				Tersedianya Data Objek Pajak PBB-P2 Yang Akurat		3172 OH				
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tertindakannya Pekan Patutan Pembayaran PBB-P2	Bapenda	1 Kegiatan	365,000,900	APBD

5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsumsi Pajak Daerah	Terlaksananya Pengisian Kelemparan Pajak dan Retribusi Daerah	Bapenda	376 OH			
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB-P2	Bapenda	1 Kegiatan	351,254,300	APBD	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah yang Berjalan	Bapenda	550 OH	82,500,000	APBD	
						Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah yang Berjalan	Bapenda	1920 OH			
						Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah yang Berjalan	Bapenda	400 OH	1,125,630,200	APBD	
						Tersedianya Tenaga Honoror Pemungut Pajak Kecamatan		1350 OB			
5	02	04	2.01	12	Pencetakan Kebersihan Pajak Daerah	Terfasilitasinya Kebersihan Wajah Pajak	Bapenda	12 Bulan	15,000,000	APBD	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan	Bapenda	840 OH	125,000,000	APBD	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Termotivasinya Petugas Pemungut / Pengelola Penertaan Daerah	Bapenda	1 Kegiatan	181,052,000	APBD	
TOTAL									Rp23,141,793,400	APBD	

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

Dra. MULIANI, S
Pembina Utama Muda
NIP. 19660924 198603 2 003

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari internal OPD maupun eksternal seperti kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang keterkaitan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dalam mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan Renja Badan Pendapatan Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah terhadap APBD Kabupaten Langkat guna mendukung percepatan pembangunan,
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
3. Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Sasaran Renja Badan Pendapatan Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Merealisasikan target penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain lain dan Bagi Hasil;
2. Menciptakan sistem manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertib dan akuntabel berbasis teknologi informasi,
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pengelola Pendapatan.

Sasaran atau objektivitas organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberi fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan setrategis terkait juga telah dicapai.

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja sasaran Tahun 2022
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Pengangguran Melalui Pengembangan Pariwisata yang terintegrasi dengan sektor Ekonomi Unggulan Daerah		LPE	
		Peningkatnya Penguatan Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	7.00%
2	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi		Indeks Reformasi Lakip	
		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi LAKIP	70 Nilai

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2022 mencakup 1 urusan 2 program terdiri 32 kegiatan yaitu:

I. Urusan Wajib Pemerintahan Umum

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis tahun ke-2, periode Renstra 2019-2024. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh personil baik ASN maupun honorer Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

STABAT, 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Dra. MULIANI S
PEMBINA MUDA UTAMA
NIP. 19660924 198603 2003

TABEL BAB IV
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
5							
5 02							
5 02 01							
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Gaji dan Tunjangan ASN - Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan - Terperuhnya Insentif Pajak Daerah - Terperuhnya Kewajiban Normatif PNS	Bapenda	12 bulan 12 bulan 1 Tahun 1 Tahun	15,000,000,000	APBD	
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	1 Tahun	800,000,000	APBD	
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi PAD Bulanan dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Bapenda	1 Dokumen	100,000,000	APBD	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS Bapenda	Bapenda	200 Set	200,000,000	APBD	
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan formal	Bertambahnya PNS yang mengikuti Diklat / kursus bidang pendapatan	Bapenda	1 Tahun	100,000,000	APBD	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya Instalasi Penerangan Listrik yang Baik	Bapenda	1 tahun	10,000,000	APBD	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya Peningkatan Kerja Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	1 Tahun	100,000,000	APBD	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Kantor	Bapenda	1 Tahun	10,000,000	APBD	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barikot dan Kopiran Kantor	Bapenda	1 tahun	150,000,000	APBD	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kejar Daerah	Bapenda	1 Tahun	400,000,000	APBD	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda	1 Unit	300,000,000	APBD	

5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Bapenda	1 Paket	100,000,000	APBD	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	1 Paket	100,000,000	APBD	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	1 Paket	100,000,000	APBD	
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	1 Paket	50,000,000	APBD	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pemabayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air	Bapenda	12 Bulan	500,000,000	APBD	
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya Peningkatan Kerja	Bapenda	1 Tahun	70,000,000	APBD	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Surat Secara Tepat Waktu Tersedianya Honorer Cleaning Service	Bapenda	1 Tahun	100,000,000	APBD	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rusin/Berkas Kendaraan Dinas Operasional	Bapenda	1 Tahun	500,000,000	APBD	
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
5	02	04	2.01	03	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terlaksananya Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	1 Tahun	50,000,000	APBD	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Pemberitahuan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberitahuan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	1 Tahun	100,000,000	APBD	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Bapenda	1 Tahun	100,000,000	APBD	
5	02	04	2.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	1 Tahun	200,000,000	APBD	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Cetak Masal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 Terlaksananya Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 Pola SISMIDP Terlaksananya Pemetaan Data Desa / Kelurahan Pola SISMIDP Terlaksananya Verifikasi, Pendaftaran dan Pemutakhiran Data OP dan PBB-P2	Bapenda	1 Paket 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan	1,000,000,000	APBD	
5	02	04	2.01	08	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	1 Tahun	100,000,000	APBD	
						Terdatanya Potensi PAD dan Tersusunnya Buku Potensi PAD Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pelaksanaan Pembayaran PBB-P2		1 Paket 12 Bulan 1 Paket			

5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah yang Tertunggak	Bapenda	1 Paket	2,100,000,000	APBD	
						Terlaksananya Penerbitan dan Pendistribusian Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah		12 Bulan			
						Terlaksananya Penyampaian SPPT		1 Paket			
						Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		12 Bulan			
						Termotivasinya Petugas Pemungut / Pengelola Penarikan Daerah		1 Paket			
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan	Bapenda	12 Bulan	230,000,000	APBD	
						Terlaksananya Verifikasi Piutang Pajak Daerah					
TOTAL									Rp23,170,000,000	APBD	

